

## PERAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Suci Oktapia <sup>1</sup>, Nisa Nur Amanda <sup>2</sup>, Rika Sartika <sup>3</sup>, Miranda Mustika <sup>4</sup>,  
Wahjoe Pangestoeti <sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji

Correspondence		
Email: <a href="mailto:soktapia@student.umrah.ac.id">soktapia@student.umrah.ac.id</a> , <a href="mailto:nnuramanda@student.umrah.ac.id">nnuramanda@student.umrah.ac.id</a> , <a href="mailto:rsartika@student.umrah.ac.id">rsartika@student.umrah.ac.id</a> , <a href="mailto:mmustika@student.umrah.ac.id">mmustika@student.umrah.ac.id</a> , <a href="mailto:wahjoepangestoeti@umrah.ac.id">wahjoepangestoeti@umrah.ac.id</a>	No. Telp:	
Submitted 3 Januari 2025	Accepted 10 Januari 2025	Published 11 Januari 2025

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran partisipasi publik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengaruhnya terhadap kualitas pengelolaan anggaran di tingkat daerah. Partisipasi publik dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas anggaran terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi baik oleh masyarakat maupun pemerintah dalam melibatkan publik dalam proses penyusunan anggaran. Temuan menunjukkan bahwa meskipun partisipasi publik dapat memperbaiki kualitas keputusan anggaran, berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat, masalah koordinasi antar instansi, serta kendala teknis dan birokratis masih menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat, perbaikan sistem informasi anggaran, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan legislatif untuk mewujudkan partisipasi publik yang lebih inklusif dan efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan partisipatif yang lebih baik dalam penyusunan APBD, guna mewujudkan pembangunan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

**Kata Kunci:** Partisipasi publik, APBD, transparansi, akuntabilitas, pembangunan daerah.

### PENDAHULUAN

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem pemerintahan yang berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya keuangan guna mendukung pelaksanaan program pembangunan di tingkat daerah. APBD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga sebagai manifestasi dari kebijakan publik yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, sehingga anggaran yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan riil dan prioritas pembangunan daerah (Dwi sukma, 2023).

Dalam konteks ini, partisipasi publik dalam proses penyusunan APBD memiliki peran yang sangat penting. Partisipasi masyarakat tidak hanya memperkaya proses pengambilan keputusan dengan masukan-masukan yang relevan dari pihak yang langsung merasakan dampak kebijakan, tetapi juga dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. Melalui berbagai mekanisme partisipasi, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, atau bahkan platform digital, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan mereka terkait alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas daerah (Elizabeth Patras et al., 2021).

Namun, meskipun partisipasi publik dalam penyusunan APBD diatur dalam berbagai regulasi sebagai bagian dari prinsip demokrasi, implementasinya tidak selalu berjalan sesuai

harapan. Tantangan utama dalam hal ini seringkali berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap proses penganggaran, keterbatasan akses terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan anggaran, serta terbatasnya ruang untuk berpartisipasi secara efektif. Selain itu, faktor politik dan birokrasi yang kompleks sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan partisipasi yang sejati, di mana keputusan-keputusan yang diambil tidak selalu mencerminkan suara atau aspirasi masyarakat secara langsung (Ummah, 2019).

Berbagai kendala ini menyebabkan partisipasi publik dalam penyusunan APBD sering kali hanya bersifat simbolik dan tidak berkontribusi signifikan terhadap substansi kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana partisipasi publik dapat mempengaruhi hasil dan kualitas penyusunan APBD, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat implementasi partisipasi yang efektif (Yaniangga, n.d.).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai pengaruh partisipasi publik dalam proses penyusunan APBD dan tantangan serta kendala yang dihadapi dalam upaya mewujudkan partisipasi tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang sejauh mana partisipasi publik mampu mempengaruhi keputusan penganggaran, serta apa saja faktor yang perlu diperbaiki agar partisipasi tersebut dapat lebih maksimal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi peningkatan kualitas pengelolaan anggaran daerah yang lebih transparan, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai tambahan, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengakomodasi partisipasi publik, serta memperbaiki mekanisme penyusunan APBD yang lebih demokratis.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel “Peran Partisipasi Publik dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” adalah studi literatur. Studi ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian terdahulu, dokumen kebijakan pemerintah, dan sumber-sumber daring terpercaya lainnya yang membahas partisipasi publik dan penyusunan APBD.

Penekanan diberikan pada literatur yang membahas konsep, prinsip, model, dan praktik partisipasi publik dalam konteks penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis dari berbagai database akademik daring, seperti Google Scholar, Academia Education, Indonesia OneSearch, dan Garuda (Garba Rujukan Digital). Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Data yang terkumpul dari berbagai sumber literatur dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasi informasi relevan terkait peran partisipasi publik dalam penyusunan APBD. Analisis dilakukan dengan menelaah secara kritis argumen, temuan, dan kesimpulan yang disajikan dalam literatur yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh terhadap Proses Penyusunan APBD

Partisipasi publik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas keputusan anggaran yang diambil oleh pemerintah daerah. Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa temuan yang menunjukkan bagaimana partisipasi publik memengaruhi hasil

anggaran, khususnya dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (JASMINE, 2014).

### 1. Peningkatan Transparansi

Salah satu dampak utama dari partisipasi publik dalam proses penyusunan APBD adalah peningkatan transparansi. Proses yang melibatkan masyarakat secara langsung, baik melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) maupun forum-forum diskusi lainnya, memberikan kesempatan bagi publik untuk memahami secara lebih mendalam tentang perencanaan dan penggunaan anggaran daerah. Informasi terkait alokasi anggaran, prioritas program, serta rasionalitas pemilihan proyek-proyek yang akan dibiayai menjadi lebih mudah diakses oleh publik. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi yang cukup untuk mengawasi dan memberi masukan terhadap kebijakan anggaran yang diusulkan.

Sebagai contoh, pada beberapa daerah yang menerapkan sistem e-budgeting dan publikasi anggaran secara daring, tingkat akses masyarakat terhadap informasi anggaran meningkat secara signifikan. Hal ini tidak hanya memudahkan masyarakat untuk mengetahui rincian anggaran, tetapi juga memperkecil ruang bagi praktik korupsi atau pemborosan anggaran (Elizabeth Patras et al., 2021).

### 2. Peningkatan Akuntabilitas

Partisipasi publik juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dalam penyusunan APBD. Ketika pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengawasan anggaran, ada dorongan yang lebih kuat bagi pemerintah untuk bertanggung jawab atas penggunaan dana publik. Masyarakat, sebagai pemangku kepentingan yang langsung merasakan dampak dari kebijakan anggaran, dapat memberikan umpan balik yang berguna untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas mereka (Silvia & Myrna, 2023).

Dalam beberapa kasus, partisipasi publik yang lebih intensif telah mendorong pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam menyajikan laporan keuangan dan perkembangan proyek-proyek yang didanai oleh APBD. Dengan adanya forum pertanggungjawaban anggaran, masyarakat dapat secara langsung meminta klarifikasi mengenai penggunaan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga mendorong pemerintah untuk lebih hati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah (Dwi sukma, 2023).

### 3. Responsivitas terhadap Kebutuhan Masyarakat

Selain transparansi dan akuntabilitas, partisipasi publik dalam penyusunan APBD juga berperan dalam meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Proses musyawarah dan diskusi yang melibatkan warga, kelompok masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (LSM) memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai prioritas pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini membantu pemerintah daerah dalam menyusun anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat, daripada sekadar mengikuti prosedur administratif atau kepentingan kelompok tertentu (Walean et al., 2021).

Misalnya, pada daerah yang memiliki sistem partisipasi publik yang kuat, seperti kota-kota yang rutin mengadakan forum warga atau konsultasi anggaran, proyek-proyek yang mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat, seperti infrastruktur desa, pendidikan, atau kesehatan, lebih mungkin mendapat alokasi dana yang lebih besar dalam APBD. Proses ini mengarah pada anggaran yang lebih adil dan seimbang, serta lebih mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat yang beragam.

### Tantangan dan Kendala

Meskipun partisipasi publik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan

daerah, implementasinya sering kali menemui berbagai tantangan dan kendala, baik dari sisi masyarakat maupun pemerintah. Adanya hambatan-hambatan ini dapat mempengaruhi efektivitas dan kualitas partisipasi publik yang diharapkan (Duadji, 2013).

### 1. Kesulitan dalam Mengedukasi Masyarakat

Salah satu tantangan utama dalam melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran adalah kurangnya pemahaman atau literasi masyarakat terkait dengan anggaran daerah. Anggaran APBD sering kali dianggap sebagai dokumen yang rumit dan teknis, sehingga sebagian besar masyarakat merasa kesulitan untuk memahami detailnya. Ketidakhahaman ini menghambat partisipasi aktif mereka dalam diskusi anggaran, yang seharusnya menjadi ruang bagi mereka untuk memberikan masukan yang konstruktif.

Pemerintah daerah sering kali berhadapan dengan tantangan besar dalam menyusun program edukasi atau pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memahami proses perencanaan dan pengelolaan anggaran. Meskipun beberapa daerah telah mengupayakan pelatihan atau sosialisasi mengenai APBD, jangkauan dan efektivitas program-program tersebut masih terbatas. Hal ini menyebabkan sebagian besar warga tidak dapat memberikan kontribusi maksimal dalam penyusunan anggaran, karena merasa kurang informasi atau pengetahuan yang cukup (Ramadhan & Ma'ruf, 2022).

### 2. Masalah Koordinasi Antar Instansi

Tantangan lain yang signifikan adalah masalah koordinasi antarinstansi pemerintah dalam melaksanakan partisipasi publik. Penyusunan APBD melibatkan berbagai pihak, mulai dari eksekutif (pemerintah daerah), legislatif (DPRD), hingga lembaga dan organisasi masyarakat. Namun, dalam banyak kasus, terdapat ketidakharmonisan atau tumpang tindih dalam peran dan tugas masing-masing pihak dalam proses partisipasi (Adeliya et al., 2017). Misalnya, meskipun pemerintah daerah sering mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah untuk partisipasi publik, sering kali koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD atau antara berbagai dinas teknis tidak berjalan dengan lancar. Hal ini dapat menyebabkan masukan dari masyarakat yang diterima dalam forum Musrenbang tidak sepenuhnya tercermin dalam kebijakan anggaran yang disusun, karena kurangnya sinkronisasi antara rencana masyarakat dan prioritas yang diputuskan oleh pemerintah daerah atau DPRD (Ummah, 2019).

### 3. Kendala Teknis dan Birokratis

Dari sisi pemerintah, terdapat berbagai kendala teknis dan birokratis yang memperlambat atau menghambat pelaksanaan partisipasi publik yang efektif. Proses perencanaan anggaran yang kompleks dan melibatkan banyak tahapan sering kali membuat partisipasi publik dianggap sebagai tambahan beban administratif, bukannya sebagai bagian integral dari penyusunan APBD. Terlebih lagi, sistem anggaran yang berlaku di banyak daerah masih bersifat top-down, di mana keputusan anggaran banyak ditentukan oleh kebijakan pusat atau kebijakan pemerintah daerah tanpa banyak mempertimbangkan masukan masyarakat.

Selain itu, kendala birokratis juga mencakup keterbatasan sumber daya manusia di tingkat pemerintah daerah, baik dalam hal jumlah maupun kapasitas. Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil atau daerah dengan anggaran terbatas, menghadapi kesulitan dalam menyediakan staf yang cukup terlatih untuk mengelola dan mengorganisir proses partisipasi publik dengan baik. Keterbatasan ini sering kali membuat proses partisipasi publik tidak maksimal dan hanya terfokus pada beberapa kelompok tertentu yang memiliki akses lebih baik, sementara kelompok lain yang mungkin lebih membutuhkan anggaran tidak dapat berpartisipasi secara efektif (Dwi sukma, 2023)

#### 4. Keterbatasan Akses dan Partisipasi yang Tidak Merata

Tantangan lain yang sering ditemui adalah ketidakmerataan dalam akses partisipasi publik. Dalam banyak kasus, masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau kawasan terpencil sering kali menghadapi kesulitan untuk mengakses forum atau kegiatan partisipasi yang diadakan oleh pemerintah daerah. Kendala geografis, kurangnya sarana transportasi, atau masalah komunikasi yang terbatas dapat menghalangi keterlibatan mereka dalam proses perencanaan anggaran. .

#### 5. Keterbatasan dalam Pengolahan dan Penyajian Data Anggaran

Tantangan teknis lainnya berkaitan dengan pengolahan dan penyajian data anggaran yang tidak memadai (Edtiyarsih, 2023). Banyak pemerintah daerah belum memiliki sistem informasi anggaran yang memadai untuk menyajikan data secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Sistem e-budgeting yang canggih dan transparan mungkin hanya diterapkan di beberapa daerah besar, sementara daerah-daerah lain masih menggunakan sistem yang kurang user-friendly dan sulit dipahami oleh warga. Ketidakmampuan untuk menyajikan anggaran dalam format yang jelas dan mudah dipahami oleh publik mengurangi potensi partisipasi yang efektif. Jika masyarakat kesulitan mengakses data anggaran atau tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang struktur dan alokasi anggaran, mereka akan kesulitan untuk memberikan masukan yang relevan dan berkualitas dalam proses penyusunan APBD.

### KESIMPULAN

Partisipasi publik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas anggaran terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, anggaran yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan prioritas lokal dan dapat diawasi secara lebih terbuka. Forum seperti Musrenbang memberikan saluran penting bagi warga untuk menyampaikan aspirasi, yang pada gilirannya membantu pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan. Meskipun demikian, berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses anggaran, masalah koordinasi antarinstansi, dan keterbatasan sistem informasi anggaran, masih menghambat efektivitas partisipasi publik.

Untuk mengoptimalkan dampak positif partisipasi publik, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi yang lebih intensif, serta perbaikan koordinasi antarinstansi untuk memastikan integrasi masukan publik dalam keputusan anggaran. Selain itu, pemerintah daerah harus memperbaiki sistem informasi anggaran agar lebih transparan dan mudah diakses, guna mendukung partisipasi yang lebih luas dan berkualitas. Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, partisipasi publik dapat menghasilkan APBD yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendorong tercapainya pembangunan daerah yang lebih merata dan berdaya saing.

### SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas partisipasi publik dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi yang mengenai anggaran, serta memperbaiki sistem informasi anggaran agar lebih transparan dan mudah diakses. Selain itu, perbaikan koordinasi antarinstansi pemerintah juga sangat penting untuk memastikan masukan publik dapat diintegrasikan dengan baik dalam kebijakan anggaran. Partisipasi publik harus lebih inklusif, menjangkau masyarakat terpinggir, dan melibatkan masyarakat secara lebih luas

melalui berbagai saluran komunikasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan APBD yang dihasilkan akan lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adeliya, N., Widodo, R., & Zuriah, N. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Civic Hukum*, 2(2), 42. <https://doi.org/10.22219/jch.v2i2.6864>
- Duadji, N. (2013). Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung. *Jurnal Bina Praja*, 05(03), 197–204. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.197-204>
- Dwi sukma, A. (2023). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Kecamatan Tanjung Kemuning). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 301–306. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.224>
- Edtiyarsih, D. D. (2023). Urgensi Anggaran Kas Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Yang Efisien Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 12(4), 368. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i4.74800>
- Elizabeth Patras, Y., Iqbal, A., Rahman, Y., Universitas Pakuan, P., Bahasa Arab MTs Assalam, G., SDN Kopo, K., & Matematika MTs Al-Mu, G. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Apbd Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(2). <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/10500/>
- JASMINE, K. (2014). URGENSI PARTISIPASI MASYARAKT DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN ANGGARAN. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Ramadhan, W. D., & Ma'ruf, M. F. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dana Desa (Studi Pada Desa Semambung, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, 429–440. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p429-440>
- Silvia, A. N., & Myrna, R. (2023). Peran Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Anggaran Publik Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Dan Efektivitas Penggunaan Dana Publik. *Edunomika*, 08(01), 1–9.
- Ummah, M. S. (2019). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA) DORO'O.O KECAMATAN LANGGUDU KABUPATEN BIMA. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Walean, T., Mantiri, M. S., & Pati, A. B. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–10.
- Yaniangga, P. (n.d.). *Analisis Partisipasi Dan Transparansi Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Merauke*. 36–54.